BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara hukum, pernyataan ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, dalam pasal ini dikatakan bahwa jaminan hak-hak asasi manusia secara tegas dilindungi oleh konstitusi. Tujuan dari hukum adalah menjamin setiap warganya untuk mendapatkan kepastian hukum supaya masyarakat mendapatkan keadilan, sehingga tercipta masyarakat yang teratur untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, mengatur masyarakat agar bertindak tertib dalam pergaulan hidup secara damai, menjaga agar masyarakat tidak bertindak anarki dengan main hakim sendiri dan menjamin keadilan bagi setiap orang akan hak-haknya sehingga tercipta masyarakat yang teratur, bahagia, dan damai.¹

Rekonstruksi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata “konstruksi” berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan “re” pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi” yang berarti pengembalian seperti semula, yang artinya dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.² Dalam *Black Law*

¹ Wibowo, Edi, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, hlm 78

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Keempat, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 942.

*Dictionary*³, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.⁵ Hak warga negara untuk mendapatkan hukum yang adil. Selain berkedudukan sama di depan hukum, setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hal ini disebutkan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Didalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman. Setiap warga negara berhak atas hidup aman dan perlindungan dari berbagai ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan hak asasi manusia.

Undang undang menjamin bahwa setiap dokter mempunyai hak mendapat perlindungan hukum dalam melakukan tugasnya yang harus sesuai dengan “*standar*

³ Bryan A. Garner, `1999, *Black Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, hlm. 1278

⁴ Nuryanto, A, 2012, Model Perlindungan Hukum Profesi Dokter, *Jurnal Jurisprudence*. Vol. 1. No.1 . Juli 2012, hlm 2

⁵ Michel, Daniel Mangkey, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis, *Jurnal lex et societatis*, vol. II. No. 8. Sep-Nov 2014, hlm 2.

profesi” yaitu batasan kemampuan (*knowledge, skill and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh “*organisasi profesi*” serta “*standar prosedur operasional*” yaitu suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu, tetap saja hal ini masih menimbulkan rasa khawatir para dokter.⁶

Menyadari kenyataan problematika perlindungan hukum di Indonesia, Pemerintah pada dasarnya telah menetapkan berbagai kebijakan dan aturan seperti:

a). Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di muat di dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “ Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya” ; b). Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit, di muat di dalam Pasal 29 (s) yang berbunyi “ Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas ”; c). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, di muat di dalam Pasal 50 ayat (a) yang berbunyi “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional” ; d). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, sebagaimana termuat di dalam Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga

⁶ Sugiarti, Ida, 2010, Perbandingan Hukum Informed Consent Indonesia dan Amerika Serikat, *Jurnal Fakultas Hukum Unisba*. Vol.XII. No. 3 November 2010, hlm 251

kesehatan”; e). Keputusan Menteri Kesehatan R.I No: 434/MENKES/SK/X/1993 tentang Pengesahan dan Pemberlakuan Kode Etik Kedokteran Indonesia sebagaimana termuat dalam Pasal 17 ayat (6) yang berbunyi “Setiap dokter yang melakukan pertolongan darurat maka kewajiban etis ini mengalahkan pertimbangan-pertimbangan etika lainnya. Dalam menjalankan kewajiban etis ini, dokter tersebut harus dilindungi dan dibela oleh teman sejawat, mitra bestari dan/atau organisasi profesi, pemerintah dan/atau masyarakat” ; f). Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 4 (e) yang berbunyi “Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Menurut Undang -Undang, dokter telah mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan profesinya sesuai standar dan prosedur, namun peristiwa malpraktik membawa keprihatinan tersendiri. Penyebab malpraktik kedokteran dapat terjadi karena tanpa adanya Standar Profesi Kedokteran (SPK), Standar Prosedur Operasional (SPO), dan *Informed Consent (IC)*.

Dengan semakin banyaknya dugaan malpraktik medis, membuat profesi kedokteran rentan terhadap tuntutan hukum, dimana dokter berhadapan dengan masyarakat yang suka berpekara (*litigious*), aparat hukum yang menggunakan tata cara atau prosedur yang ada di KUHP sebagai acuaannya, serta media sosial yang kurang berpihak kepada profesi kedokteran.⁷

⁷ Rhudy, Marseno, *Patient Safety (Keselamatan Pasien Rumah Sakit)*, diunduh dari https://marsenorhudy.wordpress.com/2011/01/07/patient-safety_keselamatan-pasien-rumah-sakit/ diakses 7 Februari 2018 jam 22.00.

Dalam menjalankan profesinya, dokter berupaya untuk menolong secara maksimal memperoleh kesembuhan / keselamatan pasiennya (*patient safety*), agar terhindar dari resiko tindakan medis yang dilakukan, dan dalam pekerjaannya juga, dokter juga memikirkan keselamatan diri (*doctor safety*) mereka dari berbagai tuntutan tuntutan hukum, sedangkan dokter sudah maksimal melakukan tindakan menolong penyelamatan pasien untuk kesembuhan, tetapi kadang kadang hal ini akan berakhir menjadi sengketa di pengadilan⁸

Menurut data Konsil Kedokteran Indonesia jumlah kasus malpraktek antara tahun 2006 - 2015 sebanyak 317 kasus, dokter umum sebanyak 114, dokter bedah 76 kasus, dokter kandungan 56 kasus, dan dokter anak 27 kasus.⁹ Semua kasus tersebut merupakan kejadian yang tidak diharapkan (*adverse event*) yang digeneralisasi sebagai malpraktik,¹⁰ dan proposisi ini didasarkan doktrin kelalaian (*doctrin of negligence*) Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.¹¹ Salah satu delik yang harus dibuktikan dalam rumusan Pasal 359 KUHP adalah unsur kelalaian. Untuk membuktikan unsur-unsur kelalaian harus memenuhi syarat yaitu; bertentangan dengan hukum, akibatnya dapat dibayangkan, akibatnya dapat dihindarkan, dan

⁸ Adhy, Kurniawan, *Patient Safety*, diunduh dari <https://adhikurniawan.wordpress.com/8/> diakses tanggal 7 Februari 2018 jam 22.31.

⁹ *Kasus malpraktek di Indonesia*, diunduh dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-malpraktek-dalam-dunia-kedokteran.html>, diakses tanggal 7 Februari 2018 jam 22.35.

¹⁰ Trisnadi, Setyo, 2017, Perlindungan Hukum Profesi Dokter dalam Penyelesaian Sengketa Medis, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.IV. 1 Januari – April 2017, hlm 24.

¹¹ Novianto, Widodo Tresno, 2015, Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur- Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice), *Jurnal Yusticia*. Vol. IV. No 2. Mei – Agustus 2015, hlm 490.

perbuatannya dapat dipersalahkan.¹² Sementara di negara maju *Common Law* seperti Amerika Serikat tidak memidanakan dokter yang melakukan kelalaian dalam melakukan tugas praktik kedokteran.¹³

Para ahli hukum pidana berpendapat bahwa untuk terjadinya kelalaian, maka yang harus diambil sebagai ukuran adalah bagaimana sebagian besar orang dalam masyarakat bertindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi.¹⁴ Treub menambahkan bahwa seorang dokter dapat dikatakan lalai, jika ia tidak tahu, tidak memeriksa, melakukan atau tidak melakukan yang dokter dokter lain yang baik bahkan pada umumnya dan di dalam keadaan yang sama, akan mengetahui, memeriksa, melakukan atau tidak melakukan.¹⁵

Ketentuan pidana juga masih diterapkan di dalam Undang - Undang Praktik Kedokteran (UUPK) maupun Undang - Undang Tenaga Kesehatan (UUNAKES) kepada dokter dalam melakukan pekerjaan profesionalnya. Menetapkan jenis pelanggaran pidana sehubungan dengan penerapan UU ini, misalnya tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 100 juta), tidak memiliki Surat Izin Praktik (sanksi sama tidak memiliki STR), sarana kesehatan yang mempekerjakan dokter/dokter gigi tanpa memiliki SIP

¹² *Ibid*, hlm 493.

¹³ Qamar, Nurul, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law system dan Common Law System*, Penerbit Refleksi, Makassar, hlm.21.

¹⁴ Kansil, CST & Christiene, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Penerbit Pradya Paramita, Jakarta, hlm 53.

¹⁵ Yunanto, Ari & Helmi, 2010, *Hukum Pidana malpraktek Medik : Tinjauan dan perspektif Medikolegal*, Penerbit Andi, Jakarta, hlm 33.

(pidana penjara 10 tahun atau denda 300 juta), sengaja tidak memasang papan nama, sengaja tidak membuat rekam medis (penjara 1 tahun atau denda 50 juta).¹⁶

Kenyataan di atas adalah suatu fakta yang tidak dapat dielakkan bahwa dokter rentan untuk diproses secara hukum tanpa melihat permasalahan sebenarnya. Pertanyaan perlu dikemukakan di sini ialah apakah kesalahan pelayanan medis benar-benar telah terjadi sengketa medik (dugaan malpraktik) atau memang sebaliknya bahwa dokter telah bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku sementara hasilnya tidak dapat mengobati pasien hingga menjadi sembuh.¹⁷

Berangkat dari masalah sengketa medis (dugaan malpraktik), konteks hubungan dokter pasien dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, perundang-undangan yang berlaku dan kelemahan-kelemahannya yang menjadi isu sentral dalam penelitian ini, sehingga judul penelitian ini, adalah: “Rekonstruksi Perlindungan Hukum terhadap Profesi Dokter Dalam Melakukan Tindak Pidana Medik di Indonesia”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan penting untuk dikaji di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja tindakan medik yang dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

¹⁶ Nuha, Richard, 2016, Analisis Hukum Kontrak Terapeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dokter Di Rumah Sakit, *Lex et Societatis*, Vol. IV. No. 3. Maret 2016, hlm 5.

¹⁷ Priharto, Adi, 2013, Formulasi Hukum Penanggulangan Malpraktek Kedokteran, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 60. Thn. XV. Agustus 2013, hlm 274.

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum profesi dokter yang melakukan tindak pidana medik di Indonesia ?
3. Bagaimana bentuk rekonstruksi hukum dalam perlindungan hukum profesi dokter yang melakukan tindak pidana medik di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis yang dikategorikan sebagai tindak pidana medik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum profesi dokter di bidang tindak pidana medik
3. Untuk menganalisis bentuk rekonstruksi hukum di bidang tindak pidana medik yang dirumuskan dalam perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, manfaatnya berupa :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi masukan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum, terutama pengetahuan teori tentang perlindungan hukum bagi profesi dokter, dan kajian beberapa aturan hukum pidana yang berlaku yang berkaitan dengan tuntutan pasien dari risiko medis

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini terfokus kepada rekonstruksi/formulasi perlindungan hukum terhadap profesi dokter, yang diharapkan bisa menjadi

pertimbangan, sumbangan pemikiran serta mencari solusi bagi pemerintah dalam upaya perlindungan hukum profesi dokter terhadap tuntutan pasien dibidang tindak pidana medis di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam kepustakaan, banyak ahli yang memakai kata teori untuk memperlihatkan kerangka berpikir secara sistematis, rasional, kenyataan dan simbolis.¹⁸ Kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Untuk hal itu perlu dilakukan penyusunan kerangka teori yang memuat pokok pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹⁹

Dalam penelitian ini, teori yang sangat relevan yaitu teori perlindungan hukum dan teori keadilan, dan yang menjadi *grand theory* nya adalah perlindungan hukum.

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam, yang lahirnya berdasarkan sejarah umat manusia dalam usahanya menemukan *absolute justice* (keadilan yang mutlak) disamping sejarah tentang kegagalan manusia mencari keadilan. Aliran hukum alam menyebut “ hukum itu langsung bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan

¹⁸ Salman, Otje dan Susanto Anton, 2005, *Teori Hukum*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm 21.

¹⁹ Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 93.

moral tidak bisa dipisahkan” yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Hukum dan moral merupakan dasar dari penganut aliran ini.²⁰

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori.²¹ Pemikiran yang eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak-hak dasar itu, tidak boleh dihalangi oleh negara.

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, berbeda dengan norma-norma yang lain, karena hukum itu berisi perintah dan/ atau

²⁰ Sidharta, Arief, 2000, *Hukum dan Logika*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 35.

²¹ Mas , Marwan , 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 116.

larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi 3 (tiga) macam, meliputi²²:

- a) *Public interest* (kepentingan umum);
- b) *Social interest* (kepentingan masyarakat);
- c) *Privat interest* (kepentingan individu).

Manfaat adanya klasifikasi kepentingan hukum menjadi 3 (tiga) macam adalah ²³:

- a) Hukum sebagai instrumen kepentingan sosial;
- b) Membantu premis-premis yang tidak terang menjadi jelas;
- c) Membuat legislator (pembuat undang-undang) menjadi sadar akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap persoalan yang khusus.

Hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

b. Teori Keadilan

Subekti berpendapat, bahwa hukum sangat berperan dalam mencapai tujuan negara dalam menyelenggarakan “ keadilan ” dan “ ketertiban ”, untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Keadilan itu dapat

²² Nurbani Septiana Erlies, Salim 2017, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Penerbit Raja Grafindo , Jakarta, hlm 266.

²³ *Ibid*, hlm 269

digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.²⁴

L.J Van Apeldoorn dalam bukunya “*Inleiding tot distudie van het nederlandsche recht*” menegaskan bahwa tujuan hukum ialah pengaturan kehidupan masyarakat secara adil dan damai dengan mengadakan keseimbangan antara hak dan kewajibannya.²⁵

Adapun hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan itu secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan, jika ia menuju peraturan yang adil, artinya adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.²⁶

Menurut Aristoteles dalam tulisannya “*Rhetorica*”, keadilan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:²⁷

1) Keadilan legal atau konvensional .

²⁴ Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm 41.

²⁵ Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm 32.

²⁶ Kansil, *op cit*, hlm 42

²⁷ Bertens, 2000, *Filsuf-Filsuf Besar tentang Manusia*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 49.

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Keadilan komutatif .

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga lainnya.

3) Keadilan distributif.

Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting adalah bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian keadilan yang sama rata.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu konsep penggambaran khusus yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam suatu karya ilmiah.²⁸ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian, maka dengan ini perlu untuk memberikan beberapa konsep yang berhubungan dengan judul dalam penelitian ini, yaitu:

²⁸ Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 79.

- a. Rekonstruksi adalah penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.²⁹
- b. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Hukum adalah penggambaran perilaku manusia beserta objek-objek yang dikenal oleh manusia dengan dan bersifat memaksa pada apa yang digambarkannya.³⁰
- d. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian berupa keterampilan, kejuruan, dan sebagainya.³¹
- e. Dokter adalah tenaga ahli dalam bidang kesehatan dengan fungsi utamanya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu pengetahuan dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op cit*, hlm 942

³⁰ *ibid*, hlm 205

³¹ *ibid*, hlm. 1104.

- f. Tindakan medis adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pasien berupa diagnostik atau terapeutik.
- g. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturanhukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.³² Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya”.³³

³² Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 35

³³ Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.42

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan mengkaji / menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang mencakup : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.³⁴

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:³⁵ (1) Pendekatan kasus (*case approach*); (2) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); (3). Pendekatan historis (*historical approach*); (4) Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*); (5) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah

³⁴ Soekanto, Soerjono & Mamuji, Sri, 2015, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 133

³⁵ Marzuki, Peter Mahmud, *op. cit*, hlm. 133

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³⁶ Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.³⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang korban, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁸

3. Sumber Data

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.³⁹

Dalam penelitian ini, bersumber dari data sekunder sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundangan di luar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidang medis.

³⁶ *Ibid*, hlm 133

³⁷ *Ibid*, hlm 135

³⁸ Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 10

³⁹ Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 12.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Konsep KUHP terbaru, makalah-makalah dan hukum kesehatan, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Inggris-Indonesia, Kamus Hukum Kesehatan dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumenter.

5. Metode Analisa Data

Data dianalisis secara normatif - kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan.